



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DANA DESA : KOMPETENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Witra Anjela¹, Yesi Mutia Basri², Julita³

Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km.12,5
Simpang Baru, Pekanbaru)

*witraanjelaa02@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the influence of the village financial accounting system, use of information technology, and supervision on the accountability of village funds with competency as a moderating variable. The sampling technique used was stratified random sampling. The population in this research is the sub-district in Kuantan Singingi Regency which consists of 15 sub-districts with research respondents being village administrators totaling 210 people. The type and source of data used in this research is primary data, the method in this research uses a quantitative approach. The data analysis method used is moderate regression analysis. Based on the research results, it is concluded that the village financial accounting system, use of information technology, and supervision influence the accountability of village funds. Competence moderates the influence of the village financial accounting system on village fund accountability. Competence moderates the influence of information technology use on village fund accountability. Competence moderates the influence of supervision on village fund accountability in Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Village Financial Accounting System, Use of Information Technology, Supervision, Accountability of Village Funds, Competence

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan terhadap akuntabilitas dana desa dengan kompetensi sebagai variabel moderasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *stratified random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 15 kecamatan dengan responden penelitian adalah pengurus desa yang berjumlah 210 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi *moderate regression analysis*. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan sistem akuntansi keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi memoderasi pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan, Akuntabilitas Dana Desa, Kompetensi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa.

Isu terkait pengelolaan dana desa adalah (1) Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Dana desa menjadi sesuatu hal sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK, masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga Rp 46,9 triliun untuk 74,7 ribu desa (www.republika.co.id tanggal 19 Mei 2016). Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

benar-benar sangat perlu untuk dikawal dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa, berbagai macam kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas dana desa juga terjadi. Korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi antara lain korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tilap dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2022. Bahkan, oknum Kades tersebut menilap dana BLT sebanyak empat bulan (Riau.com, 2023). Korupsi sebelumnya juga terjadi di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Kepala Desa Sako memperkaya diri sendiri terjadi pada Maret 2016 yang pada saat itu Desa Sako mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp 1.207.571.000. Berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Riau, perbuatan Kepala Desa Sako merugikan negara Rp 576.652.000 (Cakplah.com, 2020).

Dengan diterapkannya akuntabilitas dana desa, pemerintah bisa mengetahui sudah sejauh mana program dana desa berjalan atau tidak dan masyarakat pun mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu pemerintahan dan masyarakat desa harus bekerja sama untuk menjalankan program dana desa dan sekaligus menjadi saksi program dana desa sudah bisa mensejahterakan masyarakat.

Penelitian Arfiansyah (2021) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Estrilia (2022) menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sistem akuntansi keuangan dapat dikatakan sebagai prosedur pengendalian atau tata kelola transaksi keuangan desa. Penelitian Ningsih (2021) sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Meskipun penggunaan sistem akuntansi keuangan desa dapat dikatakan tidak terlalu baik, namun desa mampu melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2020) yang menyatakan bahwa sistem



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

akuntansi keuangan desa tidak mempunyai pengaruh pada akuntabilitas dana desa.

Penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017), serta hasil penelitian Nurkhasanah (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fithri (2019), Karyadi (2019) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Penelitian Prita (2019) menemukan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian dilakukan Atmadja & Saputra (2018), Fadhilah dan Yudianto (2018) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sweetenia, et.al. (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian ini hanya menggunakan responden yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 15 Kecamatan. Terdiri dari 70 responden. Keterbaruan dari penelitian ini yaitu adanya penggunaan variabel kompetensi sebagai variabel intervening. Tujuan ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa dengan Kompetensi sebagai Variabel Moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Agency

Berdasarkan *agency theory*, hubungan keagenan timbul manakala pihak pemberi amanah (*principal*) memberikan amanah kepada pihak lain (*agent*) guna melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan *principal*. Pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah untuk mengelola dana masyarakat harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, sebaliknya rakyat selaku pemberi amanah akan memberi insentif pada pemerintah berupa kepercayaan politik. *Agency theory* menyatakan bahwa setiap orang cenderung mementingkan dirinya sendiri dan memaksimalkan kemakmurannya melalui keputusan yang diambil dalam organisasi menurut Jensen dan Meckling 1976 dalam (Ahmad, 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/*agent*/kepala desa dan aparatnya untuk



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Muhammad Ismail, dkk. 2016).

Pengembangan Hipotesis

Sistem akuntansi keuangan desa yang baik diperlukan agar menghasilkan laporan keuangan yang baik. Hal tersebut didukung oleh penelitian Novia (2018) yang menyatakan bahwa semakin bagus sistem akuntansi keuangan desa serta semakin professional perangkat desa berdampak pada semakin bagus kualitas pengelolaan keuangan desa, pengolahan sistem akuntansi keuangan desa secara baik oleh perangkat-perangkat desa yang professional dapat berpengaruh pada kualitas pengelolaan keuangan desanya.

Dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan desa dengan baik dapat memberi manfaat yang besar serta memudahkan pemerintah desa dalam pembuatan berbagai macam laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila sistem akuntansi keuangan desa ini digunakan secara baik dan benar maka pemerintah desa dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas dan akuntabel untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian Saragih (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang diteliti oleh Putri (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

H1 : Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam integrasi pelaporan dari pemerintah desa ke pemerintah pusat, maka laporan yang dibuat akan lebih tepat waktu. Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi informasi memiliki kelebihan dalam hal tingkat akurasi serta ketepatan hasil operasi data, hal ini tentu akan dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin timbul. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan menghasilkan suatu informasi yang lebih berkualitas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Aziiz (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Yudianto (2017) menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2 : Pemanfaatan berpengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengawasan tiada lain adalah suatu proses pengamatan atas pelaksanaan segala aktivitas organisasi guna meningkatkan keyakinan agar tugas-tugas yang dikerjakan mempunyai kesesuaian dengan perencanaan (Siagian,2002). Dengan adanya pengawasan, maka timbul suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan penentuan serta evaluasi tentang sejauh mana pelaksanaan kinerja, sejauh mana kebijakan pimpinan telah dilakukan,serta sejauh mana terjadi penyimpangan selama proses pelaksanaan kinerja tersebut (Supartiningsih,2018).

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas material dalam melakukan kesepakatan perencanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Dengan diadakannya pengawasan, pengelolaan dana desa akan terhindar dari timbulnya penyimpangan serta tetap berjalan sesuai aturan maupun tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, semakin meningkatnya pengawasan dalam hal keuangan desa, maka



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Prita dan Yuliana (2019), menunjukkan bahwa Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian Umaira dan Adnan (2019) menunjukkan bahwa pengawasan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3: Pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Yulianti, 2019). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Kompetensi aparat juga sangat dibutuhkan dalam pelaporan keuangan.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri dalam hubungan keagenan. Laporan keuangan desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban pemerintah desa menjadi komponen yang sangat penting. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi komponen laporan yang memegang peranan penting dalam akuntansi desa.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Hasil penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4: Kompetensi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa

Aparatur desa sebagai sumber daya pemerintah desa yang dituntut untuk menjadi sumber daya yang kompeten. Kompetensi dapat diperoleh melalui proses pembelajaran dan pelatihan. Kegiatan pembelajaran dan pelatihan memungkinkan individu memperoleh berbagai informasi, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Aparatur desa yang kompeten dapat



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kompetensi aparatur pemerintah desa sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas. Aparatur desa yang memahami akuntansi akan meminimalisir pada kekeliruan dan mampu untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Mohune, 2013). Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Agung & Gayatri (2018) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang diperoleh.

H5: Kompetensi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Handoko, 2016).

Pelaksanaan pengawasan yang baik dalam organisasi akan mengurangi terjadinya kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal. Pencapaian kinerja yang optimal akan berdampak terhadap kepuasan kerja pegawai dan hal ini



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

juga akan berdampak kepada tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh pada kepuasan kerja pegawai.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah pemberian laporan dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi laporan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui bahwa sudah sejauhmana pemerintah memberi pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran.

H6 : Kompetensi Memoderasi Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Dana Desa

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang dipergunakan dalam meneliti suatu populasi maupun sampel tertentu dengan menganalisis data yang bersifat kuantitatif dimana tujuannya adalah menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono 2014:14). Penelitian ini menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan terhadap akuntabilitas dana desa.

Kriteria responden dalam penelitian adalah sebagai berikut kriterianya:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesra, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan dan kepala dusun.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

Sampel penelitian ini adalah seluruh adalah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 15 Kecamatan. Sedangkan yang menjadi responden penelitian adalah pengurus desa yang terdapat pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Tabel 1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Populasi	Sampel
1	Kuantan Mudik	24	7	21
2	Hulu Kuantan	12	4	12
3	Gunung Toar	14	4	12
4	Pucuk Rantau	10	3	9
5	Singingi	14	4	12
6	Singingi Hilir	12	4	12
7	Kuantan Tengah	23	7	21
8	Sentajo Raya	15	5	15
9	Benai	16	5	15
10	Kuantan Hilir	16	5	15
11	Pangean	17	5	15
12	Logas Tanah Darat	15	5	15
13	Kuantan Hilir Seberang	14	4	12
14	Cerenti	13	4	12
15	Inuman	14	4	12
	Jumlah	229	70	210

Sumber: Kantor Camat Singingi

Tabel 2.
Definisi Operasional (Pengukuran Variabel)

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Akuntabilitas (Y)	Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.(Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dari pimpinan 2. Konsisten dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku 3. Berorientasi pada visi dan misi 4. Jujur ojektif tranparan dan inovatif (Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014) 	Likert
2	Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X ₁)	Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi prosedur 2. Pihak-pihak terkait 3. Dokumen terkait 4. Jurnal standar 	Likert



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkat serta dukungan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan rencana teknologi informasi dan komunikasi yang lebih harmonis, perlu adanya Panduang Umum Teknologi Inormasi.(Perpres Nomor 9 Tahun 2005)	(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) 1. Pengambilan 2. Pengumpulan 3. Pengolahan 4. Penyimpanan 5. Penyebaran dan penyajian data. (Perpres Nomor 9 Tahun 2005)	Likert
4	Pengawasan (X ₃)	Pengawasan adalah usaha tindakan,dan kegiatan yang di tujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa. (Pemendagri Nomor 73 Tahun 2020).	1. Reviu 2. Monitoring 3. Evaluasi 4. Pemeriksaan 5. Pengawasan lainnya (Pemendagri Nomor 73 Tahun 2020)	Likert
5	Kompetensi (X ₄)	Kompetensi adalah kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten artinya sumber daya manusia tersebut cakap, mampu atau terampil.(Widyatama, 2017)	1. Pemahaman 2. Keahlian teknis 3. Pelatihan 4. Inisiatif dalam bekerja 5. Kode etik kepegawaian (Nurkhasana, 2019).	Likert

HASIL PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu koefisien. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi 5 % untuk uji 2 sisi, Jika r hitung > r tabel maka alat ukur yang digunakan dinyatakan valid dan sebaliknya, jika r hitung ≤ r tabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid, Nilai r tabel dapat diperoleh dengan persamaan $N - 2 = 188 - 2 = 186 = 0,143$. Dan r hitung diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
Sistem Akuntansi Keuangan	1	0,560	0,143	Valid



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan	
Desa (X1)	2	0,602	0,143	Valid	
	3	0,606	0,143	Valid	
	4	0,495	0,143	Valid	
	5	0,570	0,143	Valid	
	6	0,360	0,143	Valid	
	7	0,408	0,143	Valid	
	8	0,455	0,143	Valid	
	9	0,569	0,143	Valid	
	10	0,601	0,143	Valid	
	Pemanfaatan Informasi (X2)	Teknologi	1	0,705	0,143
2			0,876	0,143	Valid
3			0,621	0,143	Valid
4			0,812	0,143	Valid
5			0,645	0,143	Valid
6			0,705	0,143	Valid
7			0,876	0,143	Valid
8			0,809	0,143	Valid
9			0,761	0,143	Valid
Pengawasan (X3)			1	0,722	0,143
	2	0,678	0,143	Valid	
	3	0,579	0,143	Valid	
	4	0,632	0,143	Valid	
	5	0,782	0,143	Valid	
	6	0,396	0,143	Valid	
	7	0,901	0,143	Valid	
	8	0,587	0,143	Valid	
	9	0,434	0,143	Valid	
	10	0,528	0,143	Valid	
Kompetensi (X4)	1	0,339	0,143	Valid	
	2	0,716	0,143	Valid	
	3	0,749	0,143	Valid	
	4	0,817	0,143	Valid	
	5	0,599	0,143	Valid	
	6	0,424	0,143	Valid	
	7	0,546	0,143	Valid	
	8	0,648	0,143	Valid	
	9	0,529	0,143	Valid	
	Akuntabilitas (Y)	1	0,682	0,143	Valid
2		0,592	0,143	Valid	
3		0,754	0,143	Valid	
4		0,522	0,143	Valid	



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keputusan
	5	0,566	0,143	Valid
	6	0,519	0,143	Valid
	7	0,756	0,143	Valid
	8	0,786	0,143	Valid
	9	0,522	0,143	Valid
	10	0,861	0,143	Valid
	11	0,786	0,143	Valid
	12	0,800	0,143	Valid

Nilai r hitung seluruh item pertanyaan variabel > 0,143. Artinya adalah bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Sama halnya dengan pengujian validitas, pengujian reabilitas juga dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung besarnya *Cornbach's Alpha*. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesoner yang digunakan sebagai indikator dari variabel. Jika koefisien alpha yang dihasilkan $\geq 0,6$, maka indikator tersebut dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Dan diperoleh nilai *Cornbarh's Alpha* sebagai berikut.

Tabel 4
Uji Realibitas

No	Variabel	Standar Koefisien Alpha	<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah Pernyataan	Keterangan
1	Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X ₁)	0,600	0,692	10	Reliabel
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	0,600	0,906	9	Reliabel
3	Pengawasan (X ₃)	0,600	0,832	10	Reliabel
4	Kompetensi (X ₄)	0,600	0,782	9	Reliabel
5	Akuntabilitas (Y)	0,600	0,886	12	Reliabel

Tabel 5.12 di atas dapat diketahuin nilai reliabilitas seluruh variabel > 0,60. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau dapat dipercaya.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan SPSS Versi 27, diperoleh



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

data-data sebagai berikut:

Tabel 6
Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,578	1,569		1,006	,316
	X1	,378	,036	,343	10,559	,000
	X2	,278	,037	,260	7,463	,000
	X3	,279	,045	,239	6,255	,000
	X4	,385	,033	,414	11,807	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari Tabel 5.15, maka hasil persamaan regresi ditemukan sebagai berikut:

$$Y = 1.578 + 0.378X_1 + 0.278X_2 + 0.279X_3 + 0.385X_4 + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada alpha 5% dan *degree of freedom* $df=n-k$ ($188-5= 183$ nilai t tabel 183 pada alpha 5% = 1,9730. Tabel 5.15 diketahui variabel sistem akuntansi keuangan desa diperoleh nilai t hitung sebesar 10,559 dengan signifikansi 0,000. Diperoleh nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (*2-tailed*) dengan $df = n - k$; $\alpha/2 = 188 - 5$; $0,05/2 = 183$; $0,025 = 1,9730$. Dengan demikian diketahui t hitung ($10,559 > t$ tabel (1,9730) atau signifikansi (0,000) < alpha (0,05), artinya sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang diajukan diterima.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diperoleh nilai t hitung sebesar 7,463 dengan signifikansi 0,000. Diperoleh nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (*2-tailed*) dengan $df = n - k$; $\alpha/2 = 188 - 5$; $0,05/2 = 183$; $0,025 = 1,9730$. Dengan demikian diketahui t hitung ($7,463 > t$ tabel (1,9730) atau signifikansi (0,000) < alpha (0,05), artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang diajukan diterima.



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

Variabel pengawasan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,255 dengan signifikansi 0,000. Diperoleh nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (*2-tailed*) dengan $df = n - k$; $\alpha/2 = 188 - 5$; $0,05/2 = 183$; $0,025 = 1,9730$. Dengan demikian diketahui t hitung ($6,255 > t$ tabel ($1,9730$) atau signifikansi ($0,000 < \alpha$ ($0,05$), artinya pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang diajukan diterima.

Variabel kompetensi diperoleh nilai t hitung sebesar 11,807 dengan signifikansi 0,000. Diperoleh nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (*2-tailed*) dengan $df = n - k$; $\alpha/2 = 188 - 5$; $0,05/2 = 183$; $0,025 = 1,9730$. Dengan demikian diketahui t hitung ($11,807 > t$ tabel ($1,9730$) atau signifikansi ($0,000 < \alpha$ ($0,05$), artinya kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan diterima. Berikut penjabaran hipotesis dari setiap persamaan regresi:

Hasil Uji Moderate Regression

Hasil analisis regresi hipotesis keempat dengan metode enter untuk model analisis dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 7

Hasil Analisis Regresi MRA

Variabel	R Square	R Square	Keterangan
X1	0,376	-	
X2	0,396	-	
X3	0,487	-	
X1X4	-	0,686	Quasi Moderator
X2X4	-	0,662	Quasi Moderator
X3X4	-	0,656	Quasi Moderator

Pembahasan

Hasil penelitian menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti semakin baik sistem akuntansi keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi maka akuntabilitas dana desa juga akan semakin baik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan sistem keuangan desa dapat meningkatkan keterbukaan dalam laporan keuangan desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Teori *agency* menjelaskan bahwa kewajiban pemegang amanah/*agent*/ kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Ahmad, 2016). Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan Saragih (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Putri (2018) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi juga akan semakin baik. Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan sub bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. Artinya laporan akuntansi dan manajerial belum seluruhnya dihasilkan dari sistem yang terintegrasi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam integrasi pelaporan dari pemerintah desa ke pemerintah pusat, maka laporan yang dibuat akan lebih tepat waktu. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan Aziiz (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Yudianto (2017) menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan pada tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti semakin baik pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Kuantan Singingi maka akuntabilitas dana desa juga akan semakin baik. Hasil analisis deskriptif dengan rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan monitoring secara rutin telah dilakukan oleh Tim Pendamping Assistensi. Artinya walaupun monitoring sudah dilakukan secara rutin oleh Tim Pendamping Assistensi namun masih terdapat penggunaan dana desa yang belum terarah dan terkendali dalam penggunaannya.

Teori *agency* menyatakan bahwa pihak (*agent*) mengawasi (*principal*) dalam kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan dan menghindari terjadinya kecurangan (Azima, 2022). Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas material dalam melakukan kesepakatan perencanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Dengan diadakannya pengawasan, pengelolaan dana desa akan terhindar dari timbulnya penyimpangan serta tetap berjalan sesuai aturan maupun tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan Prita dan Yuliana (2019) menunjukkan bahwa Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kompetensi dapat memperkuat hubungan sistem akuntansi keuangan dana desa terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil ini didukung analisis deskriptif untuk pernyataan sistem keuangan desa dapat meningkatkan keterbukaan dalam laporan keuangan desa. Keterbukaan dalam laporan keuangan dapat terwujud jika pegawai memahami setiap siklus akuntansi dengan baik, serta mampu menyusun dan menyajikan setiap siklus akuntansi dengan benar.

Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

dalam hubungan keagenan. Laporan keuangan desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban pemerintah desa menjadi komponen yang sangat penting. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi komponen laporan yang memegang peranan penting dalam akuntansi desa.

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Hasil penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan pemahaman pegawai dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil ini didukung analisis deskriptif untuk pernyataan sub bagian akuntansi atau keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. Tugas masing-masing sub bagian terlaksana semakin baik jika pegawai pegawai memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan.

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Mohune, 2013). Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Agung & Gayatri (2018) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang diperoleh.

Hasil penelitian menemukan bahwa kompetensi memoderasi pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kompetensi dapat meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil ini didukung analisis deskriptif untuk pernyataan monitoring secara rutin telah dilakukan oleh Tim Pendamping Assistensi. Monitoring dilakukan tanpa adanya intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan.

Pelaksanaan pengawasan yang baik dalam organisasi akan mengurangi terjadinya kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga akan menghasilkan kinerja yang optimal. Pencapaian kinerja yang optimal akan berdampak terhadap kepuasan kerja pegawai dan hal ini juga akan berdampak kepada tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh pada kepuasan kerja pegawai.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Akuntabilitas keuangan adalah pemberian laporan dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi laporan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui bahwa sudah sejauhmana pemerintah memberi pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Kompetensi



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Kompetensi memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Kompetensi memoderasi pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas dana desa di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan, pertama Keterbatasan pada variabel independen yang digunakan yang hanya menggunakan variabel sistem akuntansi keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, pengawasan, kompetensi dan akuntabilitas dana desa.. Kedua Responden yang digunakan hanya pada lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yakni Kecamatan Singingi, Kecamatan Sentajo, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Benai

REFERENSI

- Aziiz, M.N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280-344.
- Azima, F. (2022). Akuntabilitas Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 105 – 116.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa)*. Jakarta.
- Fithri, W.K. (2019). Pengaruh Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 132-138.
- Furqan, A.C. (2021). Financial reporting, public services and local executives' re-electability in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1-22. <https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/23311975.2021.1939229?needAccess=true>
- Gelinas, S & Hunton. (2016). *Acquiring, Developing and Implementing Accounting Information System*. 10 Edition, South-Western, USA.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 33-46.
- Komarasari, W. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Artikel*, 418-425. <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1277>.
- Mada, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana



PROSIDING KONFERENSI RISET AKUNTANSI RIAU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

<https://konrariau-iaikapd.web.id/index.php/konra/>

- Desa Di Kabupaten Gorontalo, *e-jurnal unsrat*, 106-115. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17199/16748>.
- Mahmud, U. (2018). Pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Jurnal ilmiah sintesis ilmu administras*, 3(5), 1-17.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 1-17.
- Ningsih, L.P.P.S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Se-Kecamatan Ubud. *Hita Akuntansi Keuangan*, Edisi Oktober 2021, 183-198.
- Pahlawan, E.W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*. 2(2), 162-172.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Siagian, S. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Sugiarti, E & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Proceedings. Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*. Edisi 20 Juli 2017. 580-590.
- Sugiyono. (2014). *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 1190 – 1207.